

BAB I

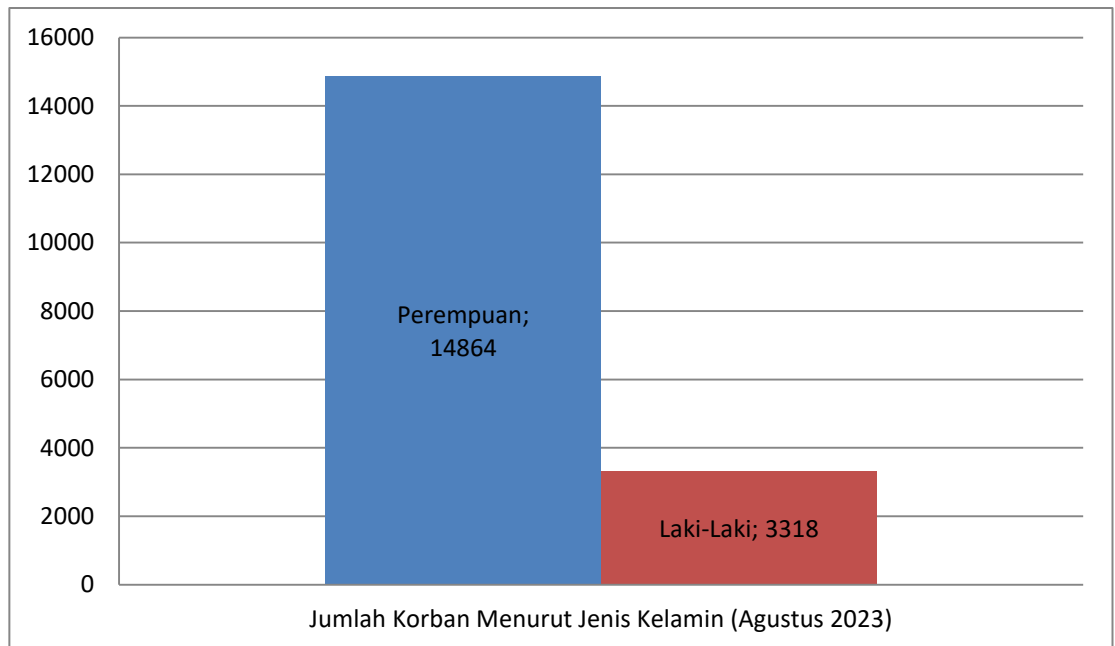
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sebuah negara dapat memberikan dampak yang positif dan juga negatif, salah satu dampak negatif yang didapatkan adalah runtuhnya nilai-nilai budaya yang ada di dalam sebuah negara. Runtuh atau bahkan hilangnya nilai-nilai tersebut akan mengakibatkan tindakan-tindakan manusia yang tidak sesuai dengan norma yang dianut masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu contoh tindakan manusia yang tidak sesuai dengan norma di dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, ditetapkan bahwa dengan adanya kekerasan terhadap perempuan maka terjadi diskriminasi terhadap perempuan, yang berarti hal tersebut tidak sesuai dengan ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Kekerasan terhadap perempuan adalah kasus yang sayangnya masih marak terjadi di dalam masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga bulan Agustus 2023 terdapat jumlah kasus kekerasan sebanyak 16.693 kasus, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 27.593 kasus (SIMFONI-PPA, 2022).

Tabel 1. 1 Jumlah Korban Menurut Jenis Kelamin (2022)



Sumber: SIMFONI-PPA (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin di Indonesia per bulan Agustus 2023 lebih besar pada perempuan yakni sebanyak 14.864 kasus sedangkan laki-laki sebanyak 3.318, yang membuktikan bahwa mayoritas kasus kekerasan terjadi pada perempuan. Komnas Perempuan membagi kekerasan dalam beberapa ranah, yakni ranah personal seperti di dalam rumah tangga, kemudian ranah publik, serta ranah negara (CATAHU, 2022). Data pengaduan dikumpulkan oleh Komnas Perempuan data pengaduan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan, serta data pengaduan dari lembaga layanan yang ada.

Tabel 1. 2 Kasus KBG Terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk Kekerasan

	Data Pengaduan Komnas Perempuan	Data Lembaga Layanan
Ranah Personal	2.098	8.172
Ranah Publik	1.276	1.634
Ranah Negara	68	-
Total	3.442 kasus	9.806 kasus

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023

Berdasarkan data dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan paling banyak terjadi pada ranah personal, yakni kekerasan dialami oleh perempuan dalam ruang privat dengan pelaku orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan maupun relasi intim dengan korban (CATAHU, 2023).

Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat yang tinggi dalam jumlah kasus kekerasan yakni sebanyak 1.979 kasus di tahun 2022, dengan Kota Semarang sebagai penyumbang kasus terbesar sebanyak 266 kasus. Pada pertengahan tahun 2023 ini, tercatat Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.231 kasus, dan Kota Semarang sebanyak 163 kasus (SIMFONI-PPA, 2023).

Tabel 1. 3 Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2019-2023

No	Jenis Kasus	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 (Januari-Agustus)	Total
1	Kekerasan Terhadap Anak	35	31	72	38	176
2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	102	95	109	74	380
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	5	4	3	3	15
4	Kekerasan Dalam Pacaran	1	5	12	10	28
5	Kekerasan Terhadap Perempuan	10	22	22	16	70

(Sumber: ASIKK PAK, 2023)

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan penyumbang angka kasus kekerasan terbesar di Kota Semarang setiap tahunnya. Kasus KDRT dari tahun 2020 hingga Agustus 2023 berjumlah 380 kasus, namun terdapat tren fluktuatif dalam jumlah kasus KDRT di Kota Semarang setiap tahunnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan maraknya kasus kekerasan terutama KDRT di dalam masyarakat, maka persoalan yang sifatnya privat berubah menjadi sebuah persoalan publik. Terjadinya kasus

tersebut, merupakan bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia, sehingga negara perlu melakukan pencegahan.

Dalam rangka mencegah KDRT, Pemerintah Daerah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, mencegah terjadinya tindakan kekerasan, menghapus segala bentuk tindakan kekerasan, serta melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari Perda No.5 tahun 2016 yang terdiri atas 1) program pencegahan tindak kekerasan termasuk KDRT; 2) perlindungan berdasarkan hukum; 3) pemulihan dari tindak kekerasan; dan 4) koordinasi antar berbagai pihak (Elista, 2020).

Di dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah serta masyarakat disebutkan memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Menurut Setiawan, dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian”, faktor permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya KDRT, diikuti dengan faktor perselingkuhan, aspek sosial, aspek budaya dan jumlah anak.

Garcia-Moreno dkk (2013:35) menyebutkan bahwa adanya kolaborasi antar sektor dapat mengatasi KDRT lebih efektif dan efisien. Kolaborasi antar sektor

terdiri dari sektor pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, lembaga hukum, lembaga kesehatan dan yang lainnya. Kolaborasi antara pemerintah dengan non-pemerintah telah dikenal sejak lama. Dengan adanya perubahan dalam paradigma dari *government* menuju *governance*, maka pemerintah sudah tidak menjadi aktor utama dalam penentu kebijakan, melainkan adanya pihak dari luar pemerintahan yang ikut menjadi aktor penentu kebijakan. Peran yang dimiliki oleh masing-masing aktor sangat bergantung pada keberhasilan sebuah kebijakan, untuk memahami lebih mendalam maka pemetaan terhadap para aktor atau *stakeholders* perlu dilakukan untuk melihat siapa yang terpengaruhi, mempengaruhi, siapa yang harus dilibatkan serta kapasitas yang perlu ditingkatkan dari masing-masing aktor (LAN, 2017: 101). Terdapat dinamika dari para aktor kebijakan yang dapat mempengaruhi proses kebijakan sesuai dengan kepentingan masing-masing, apabila terdapat pihak yang kepentingannya tidak terakomodasi maka terdapat potensi konflik dalam pelaksanaan kebijakan (LAN, 2017: 102).

Permasalahan KDRT merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KDRT di dalam masyarakat. Tanggung jawab pemerintah untuk menuntaskan permasalahan KDRT dilimpahkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Di Kota Semarang tugas tersebut diemban oleh DPPPA Kota Semarang, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2020) menunjukkan hasil bahwa DPPPA sebagai salah satu aktor kebijakan masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, dikarenakan komitmen yang dimiliki DPPPA belum maksimal. Pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun

2016, dalam mencegah kasus kekerasan maka pemerintah daerah serta masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri.

Dalam rangka mendalami *stakeholders* yang terlibat maka dalam penelitian yang dilakukan oleh Elista, dkk (2020) dengan judul “Peran *Stakeholder* Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” menjabarkan adanya 5 *stakeholders* yang terlibat yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, Tim Penggerak PKK Semarang, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata. Penelitian membuktikan bahwa terdapat beberapa *stakeholders* yang ikut mencegah KDRT di Kota Semarang, dimana DPPPA Kota Semarang merupakan *stakeholder* utama, Tim Penggerak PKK Kota Semarang sebagai fasilitator dan implementor, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata sebagai implementor, namun peran yang dimiliki oleh para *stakeholders* masih belum optimal. Salah satu faktor yang menghambat *stakeholders* adalah rendahnya komitmen, kurangnya sumberdaya manusia dan finansial, adanya tumpang tindih tugas, struktur birokrasi yang terlalu panjang, regulasi yang menghambat (Wati dan Kismartini, 2019).

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Putrihartiwi (2017) menunjukkan adanya kendala bagi para *stakeholders* untuk menjalankan perannya yakni koordinasi antar *stakeholders* yang tidak jelas, adanya ketimpangan tugas, serta kurangnya komitmen antar *stakeholder*. Sejalan dengan penelitian Putrihartiwi (2017), penelitian yang dilakukan oleh Mahartiwi (2018) menyatakan bahwa

program pencegahan KDRT mengalami kendala akibat kurangnya penyelenggaraan sosialisasi terhadap masyarakat. Kurangnya sosialisasi didukung dengan kurangnya konsistensi dalam menyampaikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 tahun 2016, sehingga masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya program pencegahan kekerasan termasuk KDRT.

Peran *stakeholder* yang masih belum optimal menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan program pencegahan dan perlindungan dari tindakan kekerasan, termasuk KDRT. Hal ini didukung dengan tingginya kasus kekerasan KDRT yang terjadi di Kota Semarang. Sebelum melihat kolaborasi yang dapat dilakukan *stakeholders*, maka menganalisis para *stakeholders* terlebih dahulu dapat melihat potensi yang dimiliki serta potensi konflik yang dapat terjadi antar *stakeholders*. Dengan menganalisis para *stakeholders* maka akar konflik yang dihadapi oleh para *stakeholders* tersebut dapat terlihat lebih jelas. Hasil yang didapatkan dalam menganalisis *stakeholders* melalui pemetaan, dapat memperlihatkan kepentingan yang dimiliki oleh para *stakeholders*, mengidentifikasi konflik yang dapat terjadi karena perbedaan kepentingan tersebut, menempatkan struktur hubungan yang optimal bagi para *stakeholders* serta dapat merumuskan jenis partisipasi yang dapat diberikan oleh para *stakeholders* (LAN, 2017: 120).

Keberadaan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang telah dibentuk, namun kasus KDRT masih terus menunjukkan angka yang memprihatinkan, di sisi yang lain peranan yang dimiliki oleh para *stakeholders* saat ini masih dianggap belum optimal. Mengatasi kasus KDRT di

Kota Semarang melibatkan berbagai aktor di dalamnya baik pemerintah dan non-pemerintah. Melihat masih belum optimalnya kinerja *stakeholders* dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang, maka peneliti melihat diperlukan adanya analisa yang mendalam terhadap *stakeholders* serta faktor-faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar *stakeholders* dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti analisis *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- (a) Kasus kekerasan berbasis gender paling banyak terjadi pada ranah personal.
- (b) Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang tergolong tinggi.
- (c) Masih kurangnya komitmen aktor implementasi kebijakan dalam menangani dan mencegah kasus KDRT di Kota Semarang
- (d) Masih kurangnya sosialisasi *stakeholders* terkait Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 tahun 2016 kepada masyarakat

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- (a) Bagaimana analisis karakteristik yang dimiliki *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang?
- (b) Bagaimana faktor penghambat *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- (a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik yang dimiliki *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.
- (b) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yakni sebagai berikut:

- (a) Manfaat Teoritis. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah pada kajian analisis *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Penelitian ini

diharapkan mampu menyediakan referensi baru terkait kebijakan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

- (b) Manfaat Praktis. Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam merumuskan, mengimplementasi serta mengevaluasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah upaya peneliti untuk mencari faktor perbandingan yang hasilnya akan dijadikan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Melalui ini peneliti terbantu dalam penelitian dalam mewujudkan orisinalitas dari peneliti, berikut penelitian terdahulu dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1. 4 Tabel Penelitian Terdahulu

(1) No	(2) Peneliti	(3) Judul	(4) Metode	(5) Tujuan	(6) Hasil
1	Elista dkk (2020)	Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran stakeholder dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang dan apakah peran yang dijalankan sudah optimal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran stakeholder belum optimal. <i>Stakeholder</i> yang ada ialah pemerintah yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator dan implementor; <i>stakeholder</i> kedua adalah lembaga masyarakat yang memiliki peran sebagai fasilitator dan implementor untuk mendorong kesadaran warga untuk melapor. <i>Stakeholder</i> terakhir adalah swasta yang memiliki peran sebagai akselerator.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Wati & Kismartini (2019)	Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi <i>stakeholders</i> dan menganalisis peran yang dimiliki serta faktor yang menghambat pelaksanaan peran.	Hasil penelitian menunjukkan ada 2 tipe <i>stakeholders</i> yakni internal dan eksternal. Internal terdiri dari DP3A Kota Semarang, PPT SERUNI, PPT Kecamatan, PKK Kota Semarang yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, fasilitator, implementor dan coordinator. <i>Stakeholders</i> eksternal adalah LSM/NGO, Masyarakat Peduli Perempuan. Faktor penghambatnya adalah rendah komitmen anggota PPT, kurangnya SDM dan finansial,umpang tindih tugas, struktur birokrasi yang berbelit, masih kentalnya budaya patriarki.
3	Prabowo & Rostyaningsih (2019)	Pemetaan Stakeholders Dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Usia Anak di Kota Semarang	Kualitatif	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh <i>stakeholders</i> serta melihat jenis-jenis <i>stakeholder</i> yang ada.	Hasil penelitian menunjukkan ada 2 jenis karakteristik <i>stakeholders</i> yakni mereka yang mendukung dan mereka yang tidak dapat menolak. Melihat lebih lanjut menggunakan indikator kepentingan, sumberdaya, saluran, kemungkinan partisipasi, tingkat pengaruh, implikasi dan aksi. <i>Stakeholders</i> yang mendukung adalah DP3A, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan, PPT Cahaya Kasih dan Yayasan Setara. <i>Stakeholders</i> yang tidak dapat menolak adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Masyarakat.
4	Masyhurah, dkk (2021)	Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang	Kualitatif	Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa peran <i>stakeholder</i> serta	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa DP3A adalah pembuat kebijakan, implement, koordinator, fasilitator dan akselerator. Sedangkan PPT SERUNI, PPT

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				melihat faktor penghambat yang untuk reintegrasi sosial.	Kecamatan, Pos JPPA memiliki peran sebagai implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator. Lalu OPD, Rumah Duta Revolusi Mental, akademisi, rumah sakit, Bhabinkamtibmas, memiliki peran sebagai fasilitator dan akselerator dan reintegrasi sosial. Faktor penghambat yang ditemukan adalah tindakan diskriminasi masyarakat kepada korban, anggaran terbatas, trauma untuk kembali ke masyarakat, serta regulasi yang masih lemah.
5	Kumalasarini, dkk (2018)	Analisis Posisi Stakeholders Program Penanggulangan TB di Lapas Klas 1 Semarang	Kualitatif	Tujuan dari penelitian ini untuk memetakan posisi <i>stakeholders</i> dalam program penanggulangan TB di Lapas Klas 1 Semarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua <i>stakeholders</i> mendukung program penanggulangan TB di Lapas Klas 1 Semarang. Peran yang dimiliki para <i>stakeholders</i> sangat memengaruhi posisi yang dimiliki, terutama yang memiliki peran advokasi dan pengawasan. Dari semua <i>stakeholders</i> yang memiliki pengaruh kuat adalah posisi Wasor, Kasi Perawatan, dan Ketua Tim TB. Sedangkan dokter, petugas pemantauan dan evaluasi memiliki sikap mendukung namun memiliki pengaruh yang lemah.
6	Ginanjari, dkk (2020)	Urgensi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Pendekatan Analisis <i>Stakeholder</i>	Kualitatif	Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi bukti urgensi Perda tentang Pengendalian DBD pada aspek <i>stakeholder</i> kebijakan.	Hasil dari penelitian menunjukkan adanya bukti dari urgensi Perda tentang Pengendalian DBD. Para <i>stakeholder</i> memiliki kekuatan dan ketertarikan yang kuat untuk mendukung urgensi kebijakan. Peneliti menggunakan analisis <i>stakeholder</i> menurut kekuatan dan ketertarikan yang selanjutnya digambarkan melalui kuadran hasil <i>mapping</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					posisi setiap <i>stakeholder</i> dalam 4 kuadran, yakni kuadran <i>stakeholder</i> utama, kuadran <i>stakeholder</i> pendukung, kuadran <i>stakeholder</i> kebijakan pasif, dan kuadran <i>stakeholder</i> pengamat.
7	Rakhmany, dkk (2020)	<i>Stakeholder Analysis</i> Program Jaminan Pangan Masyarakat (JAPANGMAS) oleh PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu	Kualitatif	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan posisi <i>stakeholders</i> potensial yang akan terlibat pada program Jaminan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis <i>stakeholder</i> merupakan alat yang efektif bagi tim perencana program untuk mengidentifikasi dan memetakan kepentingan serta pengaruh masing-masing <i>stakeholder</i> , hasilnya akan menjadi rekomendasi bagi tim perencana kebijakan. Peneliti menggunakan tabel penilaian <i>power grid</i> , tabel penilaian <i>interest</i> , dan grafik <i>power versus interest</i> .
8	Fajri, dkk (2019)	Analisis <i>Stakeholder</i> Dalam Konflik Revitalisasi <i>Emplacment</i> Stasiun Kereta Api	Kualitatif	Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan, dan model kualitatif untuk membantu melihat kepentingan para pihak di dalam konflik <i>emplacement</i> stasiun kereta api di Bukittinggi.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya 13 pihak yang terlibat secara langsung yakni 1 <i>key player</i> , 2 <i>subject</i> , 3 <i>context setter</i> , dan 9 menjadi <i>crowd</i> . Terlihat ada 1 pihak yang mendominasi sehingga sulit mencapai <i>win-win solution</i> dalam konflik.
9	Raum, Susanne (2018)	<i>A Framework for integrating systematic stakeholder analysis in ecosystem services research: Stakeholder mapping for forest ecosystem services in the UK</i>	Kualitatif	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>), menilai karakteristik, dan menganalisis	Hasil peneliti menunjukkan bahwa <i>stakeholder</i> dibagi menjadi tingkat nasional dan tingkat lokal. Terdapat 5 <i>stakeholder</i> kunci yang memiliki jangkauan luas bahkan berlipat ganda, dan sering terjadi konflik kepentingan dalam menjaga ekosistem hutan, terdapat juga pemangku kepentingan yang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				hubungan para <i>stakeholder</i> .	kurang jelas seperti publik & komunitas lokal
10	Krupa, dkk (2017)	<i>Mapping the Stakeholders: Using Social Network Analysis to Increase the Legitimacy and Transparency of Participatory Scenario Planning</i>	Kualitatif	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memetakan para <i>stakeholders</i> pada Alaska Kenai Peninsula dalam kemampuan mereka untuk mengontekstualisasikan hubungan antar pemangku kepentingan	Hasil dari penelitian menunjukkan penggunaan <i>social network analysis</i> (SNA) dapat membantu penelitian pemetaan <i>stakeholders</i> yang lebih rinci dalam <i>participatory scenario planning</i> .

Penelitian yang dilakukan oleh Elista, dkk (2020) mengambil subjek penelitian yakni DPPPAA Semarang, Dinas Pendidikan Semarang, Dinas Sosial Semarang, Tim Penggerak PKK Semarang, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata yang akan menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2019) menggunakan teknik *Ethical Analysis Grid* oleh Bryson, penelitian ini juga mengambil teknik tersebut untuk melihat karakteristik para *stakeholders* dan pemetaan para *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

Penelitian-penelitian yang telah dijelaskan pada Tabel 1.4 memberikan beberapa manfaat bagi penelitian yang hendak peneliti laksanakan. Peneliti mengetahui bahwa pemetaan *stakeholder* dalam program pencegahan KDRT belum dilakukan (Elista, 2020), dan hasil penelitian menunjukkan bahwa

pemetaan *stakeholders* dapat membantu proses sebuah program agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa peran *stakeholder* dalam penanganan KDRT atau kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang masih belum optimal. Pemetaan *stakeholder* untuk sebuah program dapat membantu mengidentifikasi karakteristik, potensi konflik, kepentingan yang dimiliki oleh para *stakeholder*. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian ini memiliki fokus untuk memetakan para *stakeholder* sesuai dengan kepentingan dan sumberdaya yang dimiliki, tidak hanya melihat peran yang diemban oleh para *stakeholder* dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang

1.5.2. Administrasi Publik

Menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam Pasolong (2019:8), administrasi publik didefinisikan sebagai berikut:

1. Adanya implementasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh berbagai badan perwakilan politik;
2. Adanya koordinasi usaha perorangan serta kelompok dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah;
3. Proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik, memberikan arah serta maksud kepada usaha sejumlah orang.

Adapula definisi administrasi publik dari Nicholas Henry dalam Pasolong (2019:9) yakni suatu kombinasi yang kompleks antara teori dengan praktek, dan bertujuan untuk promosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya

dengan masyarakat, serta mendorong kebijakan publik yang lebih responsive kepada kebutuhan sosial.

1.5.3. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Di dalam administrasi publik, terdapat ruang lingkup administrasi publik yang menurut Nicholas Henry dalam Pasolong (2019:22) sebagai berikut:

1. Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi. Dapat dimaksud dengan sebuah organisasi memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dengan organisasi lain. Di dalam organisasi terdapat anggota yang memiliki sikap dan perilaku yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempengaruhi birokrasi.
2. Manajemen publik, berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen SDM. Adanya kegiatan manajemen di dalam sebuah organisasi, meliputi evaluasi program dan produktivitas, mengatur anggaran dan juga sumber daya yang dimiliki.
3. Implementasi, adanya pendekatan terhadap sebuah kebijakan publik yakni dengan implementasinya, privatisasi, serta administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

1.5.4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik berangkat dari kata kebijakan, menurut Pasolong (2019:46) kebijakan adalah suatu hasil analisis mendalam yang berisikan berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2019:46), kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Nugroho dalam Pasolong (2019:48) menyebutkan bahwa kebijakan publik terbagi menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan *makro*, yakni kebijakan yang bersifat umum, biasa dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang hierarkinya paling atas.
2. Kebijakan *meso*, yakni kebijakan yang bersifat menengah, biasa dikeluarkan oleh pemerintah yang hierarkinya di tengah seperti tingkat provinsi atau kabupaten.
3. Kebijakan *mikro*, yakni kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan dari pemerintah yang berada di atasnya.

1.5.5. Aktor Implementasi Publik

Kusumanegara dalam LAN (2017:109) mendefinisikan aktor kebijakan sebagai aktor-aktor yang melakukan aktivitas di dalam proses kebijakan yang memiliki kaitan dengan politik. Menurut Winarno dalam LAN (2017:109), aktor kebijakan dibagi menjadi 2 kelompok, yakni para pemeran resmi yang terdiri dari birokrat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan kelompok kedua yakni pemeran tidak resmi seperti kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan masyarakat.

Pembagian aktor kebijakan publik terbagi menjadi dua jenis institusi (LAN, 2017:110), yakni sebagai berikut:

1. *Government* (Pemerintah)

Pemerintah merupakan aktor strategis yang di dalamnya terdiri atas beberapa kelompok, yakni sebagai berikut:

a. Administrasi

Administrasi diidentifikasi sebagai eksekutif yang berada pada tingkat makro dalam sebuah kebijakan publik, atau disebut sebagai *policy maker* tertinggi. Kusumanegara dalam LAN (2017:113) berpendapat bahwa kelompok ini sangat penting dalam proses kebijakan karena terdapat struktur kuat dalam merekrut para pembuat kebijakan publik yang berasal dari lingkup eksekutif. Kelompok administratif memiliki *power* (kekuatan) dan *resources* (sumber daya) yang besar, sehingga menempatkan posisi yang strategis terutama pada kebijakan makro atau skala besar.

b. Birokrat

Kelompok birokrat berasal dari dalam organisasi formal serta hierarkis, yakni birokrasi. Menurut Kusumanegara dalam LAN (2017:113), birokrat didefinisikan sebagai pihak penting dalam kebijakan karena adanya keahlian, pengetahuan serta peran penting yang dimilikinya.

c. Parlemen

Kelompok parlemen memiliki sumber daya representativitas politik yang dapat membentuk opini publik (Kusumanegara dalam LAN, 2017:114). Kelompok parlemen adalah kelompok penyambung lidah masyarakat ke dalam pemerintahan.

2. *Outside Government* (Luar Pemerintah)

Institusi yang kedua adalah aktor-aktor yang berasal dari luar pemerintahan, namun memiliki peran yang penting dalam proses kebijakan publik. Aktor-aktor ini terdiri dari beberapa kelompok, yakni sebagai berikut:

a. *Interest Group*

Kelompok kepentingan atau *interest group* merupakan perkumpulan individu atau organisasi yang memiliki perhatian/konsen yang sama, dan ingin mempengaruhi kebijakan melalui lobi terhadap aktor pemerintah (Martini dalam LAN, 2017:114). Terdapat beragam kelompok kepentingan yang ada dengan fokus yang berbeda, seperti fokus ekonomi, profesional, hak asasi manusia, lingkungan dan yang lainnya. Martini dalam LAN (2017:115) berpendapat bahwa kelompok kepentingan dapat membawa pengaruh yang terkontrol, transparan dan akuntabel.

b. Akademisi

Kelompok akademisi memiliki peranan yang penting karena mereka memiliki *resource* untuk mengakses data dalam membuat sebuah kebijakan publik yang efektif dan efisien (LAN, 2017:115). Para akademisi serta konsultan dapat memberikan rekomendasi dan preferensi untuk sebuah pembuatan kebijakan.

c. Media

Media merupakan kelompok yang penting dalam sebuah kebijakan publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam LAN (2017:115) mendefinisikan media sebagai sebuah alat atau sarana komunikasi. Media dapat didefinisikan sebagai sebuah media komunikasi serta media komunikasi digital yang menggunakan teknologi terkini. Dalam kebijakan publik, media digunakan untuk mengarahkan atau mendorong masyarakat terhadap sebuah kebijakan publik (LAN, 2017:116).

d. Partai Politik

Kelompok partai politik memiliki peran penting untuk menjaga nilai nilai demokrasi. Menurut Winarno dalam LAN (2017:116), partai politik berusaha untuk mengubah tuntutan tertentu menjadi sebuah alternatif kebijakan. Partai politik dapat menggalang opini publik untuk melontarkan isu-isu yang akan dikembangkan dalam proses *agenda setting*.

e. *Non Government Organization* (NGO)

NGO memiliki peranan penting khususnya dalam hal advokasi. Proses advokasi yang dilakukan sebuah NGO dapat dilaksanakan di dalam seluruh proses kebijakan, advokasi tersebut memiliki harapan agar kebijakan dapat berorientasi pada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan melalui terciptanya ruang atau media. Court dkk dalam LAN (2017:117) menjelaskan bahwa keberadaan NGO dalam perumusan kebijakan dapat meyakinkan para *policy maker* untuk memperhatikan suatu isu. Dalam proses formulasi, NGO berperan untuk pemberian saran atau *input* berdasarkan kajian NGO. Dalam proses implementasi, NGO berperan melakukan advokasi kebijakan. Dalam proses evaluasi, NGO berperan sebagai media antara pemerintah dan masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan.

f. Swasta

Dengan adanya konsep *good governance*, keterlibatan pihak swasta hadir dalam proses kebijakan publik. Kehadiran dari pihak swasta dapat menutup keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, seperti sumber daya.

Dwiyanto dalam LAN (2017:11) berpendapat bahwa keberadaan pihak swasta memungkinkan terlibatnya sumber daya luar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik, dan memperbesar manfaat atau dampak dari kebijakan.

1.5.6. Pemetaan Pemangku Kepentingan

WHO dalam LAN (2017:119) menjelaskan bahwa pemetaan *stakeholder* merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi serta menilai kepentingan dan peran kelompok-kelompok penting atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah kegiatan. Hasil dari pemetaan *stakeholder* akan mendapatkan informasi seperti pihak mana yang dipengaruhi, pihak mana yang dapat mempengaruhi, pihak mana yang harus dilibatkan, dan kapasitas pihak mana yang perlu ditingkatkan. Schmeer dalam LAN (2017:120) berpendapat bahwa pemetaan *stakeholder* perlu dilaksanakan dalam proses pembuatan kebijakan untuk mengkaji kepentingan, posisi serta sikap para aktor terhadap kebijakan. Menurut Golder dalam LAN (2017:120), pemetaan *stakeholder* dilakukan untuk mengidentifikasi *interest* atau ketertarikan para *stakeholder* terhadap kebijakan, melihat potensi konflik para aktor, membangun relasi dengan para *stakeholder* serta meminimalisir resiko kegagalan sebuah kebijakan.

Untuk melakukan pemetaan *stakeholder* dapat menggunakan cara *Policy Implementation Mapping* dengan teknik *Ethical Analysis Grid* oleh Bryson (LAN, 2017:127). Teknik ini digunakan untuk membantu para aktor kebijakan dalam melakukan perencanaan serta membuat keputusan sehingga mendapatkan

gambaran yang lebih jelas tentang apa yang perlu diimplementasi yang dapat memanfaatkan kepentingan dan sumber daya para *stakeholders*.

Tabel 1. 5 Ethical Analysis Grid

Kategori <i>Stakeholder</i>	Kepentingan	Sumberd-aya	<i>Channel</i>	Kemungkinan Partisipasi	Tingkat Pengaruh	Implika-si	<i>Action</i>
Mereka yang (potensial) mendukung							
Mereka yang (potensial) menolak							

Sumber: Bryson dalam LAN (2017:127)

Di dalam teknik ini terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk menilai dua kategori *stakeholder* yakni sebagai berikut:

a. Kepentingan

Kepentingan *stakeholder* adalah hal-hal yang diperjuangkan oleh para *stakeholder*. Menurut Grindle dalam Agustino (2022: 160), kepentingan *stakeholder* terdiri dari persepsi, keterlibatan, solusi yang dimiliki, intervensi pihak lain dalam keputusan yang dibuat *stakeholder* serta insentif yang mendasari pilihan *stakeholder*.

b. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang hendak digunakan *stakeholder* untuk memperjuangkan kepentingan. Edward III dalam Agustino (2022: 155) berpendapat bahwa aktor implementasi membutuhkan sumber daya seperti staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas.

c. *Channel*

Channel atau saluran diartikan sebagai jalan atau saluran yang hendak akan digunakan para *stakeholder* untuk memperjuangkan kepentingan.

d. Kemungkinan Partisipasi

Indikator kemungkinan partisipasi didefinisikan sebagai besarnya kemungkinan *stakeholder* untuk berpartisipasi atau bersikap terkait kepentingan yang mereka miliki.

e. Tingkat Pengaruh

Indikator tingkat pengaruh didefinisikan dengan pengaruh yang didapat dari penguasaan sumber daya atau dari partisipasi *stakeholder*.

f. Implikasi

Indikator implikasi didefinisikan dengan implikasi pengaruh *stakeholder* terhadap strategi implementasi kebijakan.

g. *Action*

Indikator tindakan atau *action* didefinisikan sebagai tindakan yang perlu dilakukan untuk mensikapi atau mengantisipasi *stakeholder* dengan pengaruh yang dimilikinya.

1.5.7. Faktor Penghambat *Stakeholders*

Hambatan yang dimiliki *stakeholders* dapat diketahui dengan menggunakan teori *collaborative governance*. Menurut Ansell dan Gash (2007: 545) *collaborative governance* didefinisikan sebagai tipe *governance* yang melibatkan aktor publik dan privat untuk melakukan kerjasama, yakni pemerintah melibatkan *stakeholders* non-pemerintah untuk membentuk sebuah kebijakan dalam

memecahkan suatu permasalahan di dalam masyarakat. Tang dan Masmanian (2008: 5) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah konsep penggabungan antara sektor publik dan non publik dengan partisipasi sukarela untuk membangun, mengoperasikan dan memonitor suatu pengaturan. Penyelesaian suatu masalah publik membutuhkan keterlibatan antara pihak pemerintah dan non-pemerintah, yang bisa disebutkan sebagai *stakeholders*. Kolaborasi yang dihasilkan dari *stakeholders* akan menghasilkan suatu solusi untuk masalah publik.

Dalam menjalankan kolaborasi tersebut, terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh *stakeholders*. Faktor yang menghambat terjalannya kolaborasi *stakeholders* menurut Sudarmo (2011: 117) adalah sebagai berikut:

a. Faktor Budaya

Faktor budaya menyebabkan kolaborasi *stakeholders* terhambat karena adanya budaya yang kaku pada prosedur, yang mengakibatkan para *stakeholders* terbatas ruang gerak untuk menciptakan terobosan baru. Faktor budaya atau kultural berkaitan dengan budaya bekerja pada suatu institusi yang terlibat dalam kolaborasi.

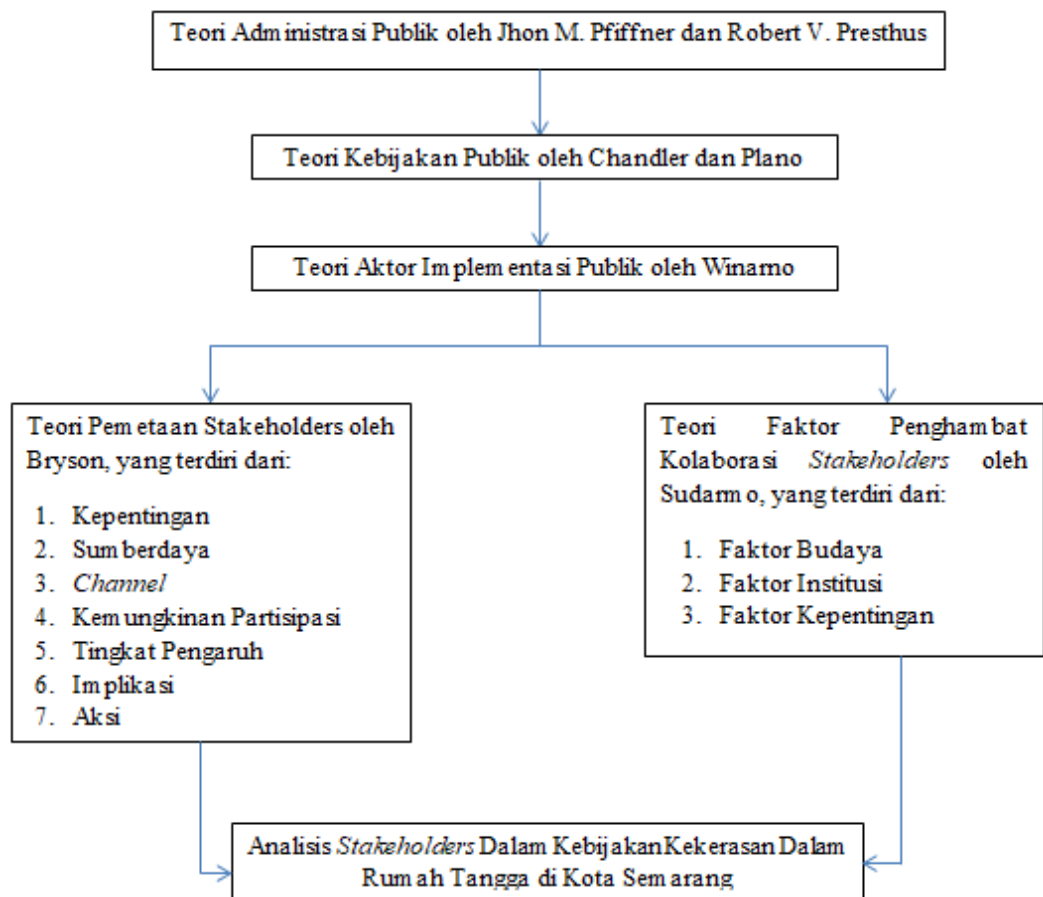
b. Faktor Institusi

Faktor institusi menyebabkan kolaborasi *stakeholders* terhambat karena *stakeholders* yang terlibat menetapkan struktur hierarkis atau vertikal dalam menjalankan kerjasama. Dewi (2012) menyatakan bahwa untuk menjalin kolaborasi dibutuhkan struktur horizontal dari *stakeholders* baik pemerintah maupun non-pemerintah.

c. Faktor Politis

Faktor politis dapat menghambat kolaborasi *stakeholders* karena tujuan dari para *stakeholders* berbeda-beda, selain itu para pemimpin dari masing-masing *stakeholders* yang kurang inovatif dan kurang mengarahkan institusi akan menghambat proses kolaborasi dari *stakeholders*.

Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Pasolong (2019); LAN (2017); Sudarmo (2011)

1.6. Operasionalisasi Konsep

Pemetaan *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah menempatkan atau mengkategorikan para pemangku kepentingan

atau *stakeholders* kedalam dua kategori yakni berpotensi mendukung dan berpotensi menolak suatu kebijakan.

Pemetaan dilakukan dengan melihat beberapa hal, peneliti akan melihat:

a. Kepentingan

Kepentingan yang dibawa oleh para *stakeholder* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Dalam menganalisa kepentingan yang dibawa oleh *stakeholder*, maka peneliti akan melihat mengenai

- Persepsi *stakeholders* terkait kekerasan dalam rumah tangga.
- Keterlibatan *stakeholders* dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga.
- Solusi yang dimiliki oleh *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- Intervensi pihak lain dalam keputusan *stakeholders* menyetujui maupun menolak kekerasan dalam rumah tangga.
- Alasan keuangan (insentif) yang mendasari pilihan *stakeholders*.

b. Sumber daya

Sumberdaya yang digunakan oleh *stakeholders* untuk dapat melaksanakan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang, maka peneliti akan menganalisis:

- Ketersediaan, kecukupan dan kompetensi yang dimiliki staff atau anggota dari para *stakeholders*.

- Informasi mengenai peraturan yang diterapkan sehingga dapat mengetahui siapa saja yang dapat terlibat dan juga penguasaan terhadap undang-undang yang ada.
- Kewenangan atau otoritas atau legitimasi yang dimiliki para *stakeholders* untuk mencapai tujuan.
- Fasilitas berupa fisik seperti sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan proses pencapaian tujuan para *stakeholders*.

c. *Channel*

Saluran atau *channel* yang dimiliki *stakeholder* baik kepada pembuat keputusan, maupun dengan pihak lain untuk dapat menjalankan kepentingannya dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

d. Kemungkinan Partisipasi

Partisipasi yang dapat mungkin dilakukan oleh *stakeholder* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Partisipasi tidak hanya berupa materi namun juga dalam bentuk pemikiran, keterlibatan moral, mental dan lainnya.

e. Tingkat Pengaruh

Pengaruh yang dimiliki oleh *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Pengaruh yang dimaksud berupa seberapa besar kemampuan yang dimiliki para

stakeholders dalam mempengaruhi pasangan suami istri agar tidak melakukan praktek kekerasan dalam rumah tangga.

f. Implikasi

Implikasi atau hasil langsung yang muncul dari tindakan yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

g. *Action*

Aksi yang sudah dan yang harus dilakukan oleh *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

Setelah menganalisis beberapa indikator tersebut, maka selanjutnya akan ditemukan posisi dari para aktor apakah berpotensi mendukung atau berpotensi menolak dalam tujuannya untuk menjalankan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

Faktor yang dapat menghambat kolaborasi *stakeholders* dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari beberapa faktor yakni sebagai berikut:

a. Budaya organisasi para *stakeholders*

Hambatan yang dimiliki *stakeholders* pada masing-masing institusi untuk bekerja dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

b. Sistem kerjasama para *stakeholders*

Hambatan berasal dari sistem kerjasama yang vertikal atau hierarkis, dimana para *stakeholders* menunggu adanya perintah dari *stakeholder* utama sehingga tidak adanya inisiatif untuk membentuk inovasi.

c. Kepentingan *stakeholders*

Hambatan berasal dari perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh *stakeholders* dalam menjalankan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada kecurigaan dan keingintahuan peneliti terkait analisis *stakeholders* dalam program pencegahan KDRT, mengatasi dan mencegah KDRT di Kota Semarang telah yang sudah berjalan cukup lama namun untuk peran dan posisi para *stakeholders* masih belum optimal. Peneliti beranggapan bahwa dengan meneliti karakteristik dan faktor penghambat yang dimiliki para *stakeholders* dapat membantu mengatasi dan mencegah kasus KDRT di Kota Semarang lebih optimal.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hardani, dkk (2020:39) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan penguraian dan pemahaman terhadap gejala yang diamatinya, pemahaman yang dimaksud bukan dari sudut pandang peneliti saja namun dari sudut panjang subjek yang diteliti juga. Penelitian yang

menggunakan pendekatan kualitatif dilaksanakan dengan memahami gejala yang menjadi pusat perhatian penelitian. Metode penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mencari hubungan antara fenomena dengan membandingkan perbedaan atau persamaan sifat dari gejala yang telah ditemukan (Hardani dkk, 2020:41). Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala atau kejadian secara sistematis dan akurat.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan dan menganalisis terkait karakteristik *stakeholders* dan faktor penghambat dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti memperoleh informasi terkait data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti perlu mengemukakan dimana tempat yang akan diteliti (Nugrahani, 2014: 112). Maka dalam penelitian ini peneliti melaksanakan penelitian pada *stakeholders* yang teridentifikasi terlibat untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang memberikan informasi terkait penelitian yang sedang diteliti yang dipilih secara *purposive* dan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan tertentu. Pemilihan subjek penelitian *purposive* dapat diartikan sebuah teknik pengambilan subjek penelitian yang berdasarkan adanya ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti. Pemilihan subjek penelitian ini berdasarkan pada tema penelitian yang diteliti terkait pemetaan *stakeholders* dalam program

pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Maka peneliti menentukan subjek penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
- b. Dinas Pendidikan Kota Semarang;
- c. Dinas Sosial Kota Semarang;
- d. Tim Penggerak PKK Semarang;
- e. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata;
- f. Masyarakat.

1.8.4. Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif data yang diambil adalah data yang bersifat deskriptif, data dapat berupa dokumen foto, maupun catatan lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Nugrahani, 2014: 4) penelitian kualitatif mampu menghasilkan data deskriptif yang dapat berupa tulisan, ucapan, dan perilaku dari informan yang diamati. Dalam penelitian ini tidak mengutamakan angka dan statistik namun juga tidak menolak data kuantitatif, peneliti cenderung lebih menggunakan teks atau kata-kata tertulis untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait mengidentifikasi stakeholders dan pemetaan *stakeholders* dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang disebutkan dalam penelitian ini adalah asal muasal diperolehnya subjek dan memiliki informasi yang jelas terkait pengambilan dan pengolahan data. Menurut Subroto (Nugrahani, 2014:107), data bisa terdapat pada segala sesuatu apa pun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian. Menurut

Nugrahani (2014:109), beragam sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan jenis dan posisinya mulai dari yang paling nyata hingga yang samar-samar, mulai dari yang primer hingga sekunder, antara lain:

1. Narasumber (*informant*)
2. Dokumen atau arsip
3. Peristiwa atau aktivitas
4. Tempat atau lokasi
5. Benda, gambar serta rekaman

Sumber data dapat terbagi menjadi dua jenis, sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Hardani dkk (2020:247) data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Tim Penggerak PKK Semarang, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata, masyarakat.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017: 245) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Dapat disimpulkan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh secara

tidak langsung. Data sekunder dari penelitian ini adalah literatur, jurnal, artikel, berita dalam situs-situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, media berita tentang KDRT di Kota Semarang, dan lainnya.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang utama dalam penelitian, karena bagaimanapun juga tujuan daripada penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2017: 225) teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi peserta, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau disebut dengan triangulasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik observasi dan dokumen.

1. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2017: 231) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan yang dilakukan oleh dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara terstruktur atau *structured interview*, menurut Esterberg (dalam Sugiyono 2017: 233) wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada semua informan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dikarenakan ingin mengetahui

setiap poin dari setiap segi perspektif, sumberdaya, dan aksi yang dilakukan para informan.

2. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017: 240). Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya. Dokumen dalam penelitian ini menggunakan catatan akhir tahun Komnas Perempuan, modul pelatihan Lembaga Administrasi Negara, serta dokumentasi kegiatan dari para informan.

1.8.7. Analisis Data

Menurut Mather B. Miles dan Michael Huberman (Ahyar, 2020:163) analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi saat analisis data kualitatif, yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Menurut Riyanto (Hardani dkk, 2020:165), reduksi data dapat diartikan dengan data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstraksikan. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya (Hardani dkk, 2020:168).

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung ada tahap pengumpulan data berikutnya. Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap.

Dalam ketiga tahapan analisis data tersebut yang saling berkaitan satu sama lain dimana dalam melakukan penelitian dibutuhkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut dilakukan reduksi data atau merangkum data dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian, yakni analisis *stakeholders* dan faktor penghambat dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang. Selanjutnya dari reduksi data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks naratif dan terakhir membuat kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang telah diperoleh.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data merupakan hal penting dari suatu bagian penelitian kualitatif karena akan mempengaruhi kualitas penelitian. Menurut Sugiyono (2017: 137) dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2017: 241). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2017: 241). Penelitian ini melakukan pengumpulan dari berbagai sumber data dengan teknik yang sama yakni wawancara melalui narasumber.